

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak hanya untuk kebutuhan manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua landasan tersebut merupakan upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (**Hapsari, 2007**). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar.

Peningkatan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan SAP, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan perkembangan akuntansi pemerintahan saat

ini. Setelah penerapan *single entry* ke *double entry accounting* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, dan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pengantar dari akuntansi berbasis kas menuju akrual kearah akuntansi berbasis akrual penuh dengan masa tenggang selama 4 tahun.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK) ialah satu-satunya lembaga yang melaksanakan diklat kemetrolgian di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1924. Kemajuan teknologi yang sangat pesat akan merubah penggunaan alat ukur yang berada dipasara yang berawal dari manual kini sudah berunah menjadi alat ukur otomatis.

Menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdapat dua lampiran yang membahas mengenai sistem pencatatan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor satu. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK) merupakan instansi pemerintah yang diharuskan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum guna sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangannya.

Pada saat ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK) telah membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan dan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif.

Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK) diupayakan pengaplikasiannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru sesuai dengan lampiran I dan lampiran II yang menyatakan bahwa pada lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014.

Dengan penjelasan diatas penulis ingin meninjau apakah instansi yang penulis teliti sudah sesuai dengan peraturan yang baru atau sedang menuju basis

akrual atau sama sekali belum melakukan perubahan terhadap penyajian laporan keuangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (PPSDMK) Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.
2. Bagaimana pengaruh perubahan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud dari penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh perubahan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah, dengan maksud ini adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Mengetahui telah dilaksanakannya atau belum Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.
2. Mengetahui pengaruh perubahan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Penelitian ini dilakukan dengan harapan adanya kegunaan bagi :

1. Penulis

Menambah wawasan dan ilmu baru baik secara teori maupun praktik khususnya mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan pusat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Pemerintah daerah

Sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan, dan ada manfaat pengetahuan lebih tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga mampu menerapkannya dengan efektif.

3. Pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi penelitian yang penulis ambil pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian (PPSDMK) yang berada di jalan Daeng Muh. Ardiwinata KM 3,4 Cihanjuang Parongpong Bandung 40559. Penelitian ini dilakukan mulai 8 April 2014 sampai dengan 8 Juni 2014.